

*Saiful Mujani*  
*R. William Liddle*  
*Kuskridho Ambardi*

# KUASA RAKYAT

*Analisis tentang Perilaku Memilih dalam  
Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia  
Pasca-Orde Baru*

"Buku ini membuka cakrawala dan perspektif baru dalam studi politik Indonesia karena menggunakan data empiris berdasarkan pengukuran yang lebih objektif."

—Hamdi Muluk

Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia

# KUASA RAKYAT

ANALISIS TENTANG PERILAKU MEMILIH DALAM  
PEMILIHAN LEGISLATIF DAN PRESIDEN INDONESIA  
PASCA-ORDE BARU

Saiful Mujani  
R. William Liddle  
Kuskridho Ambardi

## **Kuasa Rakyat**

Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan  
Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru

Penulis: Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi

Copyright © Saiful Mujani, 2011  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Editor: Luqman Junaidi  
Penyelaras aksara: Nouval Maulana  
Desain sampul: Patricia Adele  
Penata letak: Dzul Yamin

Mizan Publika (Anggota IKAPI)  
Jln. Jagakarsa No.40 Rt.007/Rw.04  
Jagakarsa-Jakarta Selatan  
Telp: 021-78880556, Fax: 021-78880563  
E-mail: editor.wacana@noura.mizan.com  
<http://nourabooks.mizan.com>

ISBN: 978-979-433-684-7

Cetakan I, Juni 2012

Didistribusikan oleh Mizan Media Utama (MMU)  
Jln. Cinambo (Cisaranten Wetan) No. 146, Ujungberung, Bandung 40294  
Telp.: 022-7815500, Faks.: 022-7802288  
E-mail: mizanmu@bdg.centrin.net.id

**Jakarta:** Telp.: 021-7874455, 021-78891213, Faks.: 021-7864272  
**Surabaya:** Telp.: 031-8281857, 031-60050079, Faks.: 031-8289318  
**Pekanbaru:** Telp.: 0761-20716, 0761-29811, Faks.: 0761-20716  
**Medan:** Telp.: 061-7360841, Faks.: 061-736 0841  
**Makassar:** Telp./Faks.: 0411-873655  
**Yogyakarta:** Telp.: 0274-885485, Faks.: 0274-885527  
**Banjarmasin:** Telp.: 0511-3252178, Faks.: 0511-3252178

Layanan SMS: Jakarta: 021-92016229  
BANDUNG: 08888280556

# PENGANTAR

**K**EBIJAKAN-KEBIJAKAN PUBLIK yang menyangkut kepentingan rakyat secara nasional dibuat oleh presiden dan anggota DPR. Kedua lembaga ini pula, yang secara berbarengan atau sendirian, mencalonkan dan memilih pejabat yang menduduki jabatan-jabatan publik strategis seperti di kementerian atau kabinet, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Bank Indonesia. Oleh karena itu, presiden dan DPR sangatlah berkuasa dalam demokrasi Indonesia sekarang. Pada zaman Orde Baru, DPR tidak mempunyai kekuasaan faktual seperti itu. Sementara itu, presiden dan anggota DPR dipilih oleh rakyat lewat pemilihan umum atau pemilihan presiden. Rakyat atau pemilih sendiri yang menentukan nasib presiden dan anggota DPR lima tahun sekali. Sampai pada tingkat ini, rakyat berkuasa, dan menjadi fondasi bulat-lonjongnya negeri ini.

Karena itu, memahami pola-pola sikap dan perilaku politik rakyat yang diwujudkan dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden, bukan saja penting secara akademik tetapi juga secara praktis bagi kehidupan kolektif bangsa ini. Buku tentang masalah ini yang berbasis pada riset empiris berskala

# ISI BUKU

PENGANTAR — V

UCAPAN TERIMA KASIH — IX

BAB 1. PENDAHULUAN — 1

Model Sosiologis — 6

Model Psikologis — 22

Model Pilihan Rasional — 27

Pengukuran — 35

Metodologi dan Data — 36

Kerangka Analisis — 37

BAB 2. KEMUNCULAN WARGA KRITIS: DUKUNGAN  
PADA DEMOKRASI DAN KRITIK TERHADAP  
KINERJANYA — 43

Dukungan pada Demokrasi dan Kritik terhadap  
Kinerjanya — 43

Komitmen Terhadap Demokrasi — 45

Kinerja Demokrasi — 52

Jurdil — 53

Komitmen pada Demokrasi, Kinerja Demokrasi, dan Kinerja Pemerintah —	57
Partai Politik —	61
Pemilih Terdidik-Perkotaan —	66
Ringkasan —	71

### BAB 3. PARTISIPASI DAN PILIHAN POLITIK — 75

Partisipasi Politik —	76
Dimensi dan Ukuran —	80
Pilihan Politik —	101
Partai atau Calon Anggota DPR Pilihan —	101
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) —	106
Golongan Karya (Golkar) dan Partai Golongan Karya —	111
Partai-Partai Islam —	118
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) —	119
Partai Keadilan (PK) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) —	121
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) —	123
Partai Amanat Nasional (PAN) —	125
Partai Demokrat —	127
Gerindra dan Hanura —	129
Memilih Presiden —	130
Megawati dan Hasyim Muzadi —	137
Wiranto-Salahuddin Wahid —	142
SBY-Kalla —	145
Amien Rais-Siswono —	149
Hamzah Haz-Agum Gumelar —	153
SBY-Boediono —	157
JK-Wiranto —	158
Megawati-Prabowo —	160

**BAB 4. AGAMA, SUKU BANGSA, DAN KELAS SOSIAL — 163**

Agama dan Keberagaman — 165

Agama dan Pilihan Politik — 185

Afiliasi Agama — 188

Kesalahan Muslim — 192

Daerah dan Suku Bangsa — 204

Kelas Sosial — 217

Pedesaan-Perkotaan — 220

Pendidikan, Pekerjaan, dan Pendapatan — 233

Gender — 258

Umur — 268

Independensi Efek Sosiologis — 283

Penutup — 300

**BAB 5. RASIONALITAS PERILAKU MEMILIH — 305**

Partisipasi Politik — 306

Pilihan Politik — 319

Evaluasi Kinerja Pemerintah — 346

Independensi Ekonomi-Politik — 358

Ringkasan — 365

**BAB 6. IDENTITAS PARTAI DAN TOKOH POLITIK — 371**

Identitas Partai — 373

Dinamika Identitas Partai — 378

Identitas Partai dan Partisipasi politik — 381

Informasi politik — 386

Diskusi Politik — 388

Tertarik Politik — 393

Pilihan Politik — 399

Sosialisasi Politik — 406

Kualitas Tokoh — 425

Media Massa — 435

Ringkasan — 443

**BAB 7. KESIMPULAN — 449**

Demokrat Kritis — 449

Partisipasi Politik — 452

Pilihan Politik — 454

**CATATAN-CATATAN — 469****APENDIKS 1 — 491****APENDIKS 2 — 495****PUSTAKA RUJUKAN — 517****INDEKS — 531****TENTANG PENULIS — 553**

## Bab 1

# PENDAHULUAN

**P**ARTISIPASI ANGGOTA MASYARAKAT dalam memilih pemimpin mereka dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), ataupun dalam pemilihan presiden, adalah gejala yang masih langka dalam sejarah politik Indonesia modern. Partisipasi dalam memilih anggota DPR pertama kali diadakan tahun 1955, sekitar sepuluh tahun setelah Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka.

Ketika parlemen dibubarkan Presiden Soekarno tahun 1959 melalui Dekrit Presiden, dan negara kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi parlementer berakhir. Sesuai dengan UUD 45, sistem pemerintahan lebih menyerupai kombinasi antara sistem parlementer dan sistem presidensial.

Dalam sistem campuran ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada MPR. Sejak demokrasi parlementer dibubarkan tahun 1959, sistem pemerintahan campuran ala UUD 45 tersebut

## Bab 2

# KEMUNCULAN WARGA KRITIS

DUKUNGAN PADA DEMOKRASI DAN  
KRITIK TERHADAP KINERJANYA

**D**ALAM SEJARAH INDONESIA, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah dilakukan sebanyak sepuluh kali. Sepanjang periode itu pula, pemilihan presiden secara langsung telah diselenggarakan sebanyak tiga kali. Pemilu pertama diadakan pada 1955, dan dinilai oleh para pengamat sebagai pemilu yang demokratis (Feith, 1956). Sedangkan enam kali Pemilu zaman Orde Baru dinilai sebagai pemilu yang tidak demokratis (Anderson, 1996; Liddle, 1996). Sementara itu, Pemilu dan Pilpres pasca-Orde Baru dinilai demokratis oleh kebanyakan pengamat, terutama pengamat dari luar negeri (IFES, 1999, 2004, 2009; NDI 1999, 2004). Namun demikian, cukup banyak pihak yang mempersoalkan tingkat demokrasi pemilu dan pilpres pasca-Orde Baru.

Pemilu 1999 ditandai oleh kegagalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan hasil pemilu sehingga Presiden Habibie mengambil alih dengan menyatakan bahwa proses pemilu telah selesai dan hasil pemilu itu sah. Langkah Habibie ini dibenarkan menurut Undang-Undang Pemilu, dan

## Bab 3

# PARTISIPASI DAN PILIHAN POLITIK

**S**ECARA POPULAR atau menurut penilaian rakyat, sebagaimana dipaparkan pada Bab 2, Pemilu dan Pilpres Indonesia pasca-Orde Baru telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Pemilu dan pilpres tersebut secara umum dinilai jujur dan adil serta bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber). Oleh karena itu, pemilu dan pilpres tersebut secara demokratis menjadi bermakna, dan penting untuk dikaji lebih jauh.

Dalam studi pemilu atau pilpres, ada dua komponen pokok yang biasa menjadi perhatian utama: partisipasi politik dan pilihan politik. Bagian *pertama*, berkaitan dengan keikutsertaan warga memilih calon atau partai dan bentuk-bentuk partisipasi lain yang terkait, terutama keikutsertaan dalam kampanye. *Kedua*, berkaitan dengan calon atau partai yang dipilih dalam pemilu atau pilpres.

Bab ini akan menelaah partisipasi dan pilihan politik tersebut. Keduanya merupakan variabel dependen yang akan dianalisis dalam bab-bab berikutnya sesuai dengan kerangka teoretis dalam studi perilaku memilih.

## Bab 4

# AGAMA, SUKU BANGSA, DAN KELAS SOSIAL

**S**ETELAH MENGGAMBARAKAN PARTISIPASI DAN PILIHAN POLITIK pada bab sebelumnya, serangkaian pertanyaan dasar dalam studi perilaku memilih para pemilih dalam pemilu ataupun pilpres berkisar pada mengapa warga ikut serta dalam pemilu atau pilpres dan kegiatan-kegiatan politik terkait lainnya seperti kampanye atau membantu partai atau calon. Pertanyaannya kemudian: Mengapa sebuah partai politik atau seorang calon DPR menang dalam sebuah pemilu, dan mengapa yang lain kalah? Mengapa pasangan calon presiden-wakil presiden mendapat suara paling banyak, dan mengapa pasangan lainnya mendapat suara paling sedikit? Faktor-faktor apa yang memengaruhi partisipasi dan pilihan politik warga tersebut?

Dalam studi perilaku memilih, seperti telah dikemukakan pada Bab Pendahuluan, ada tiga model yang dipercaya dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu model sosiologis, model pilihan rasional, dan model psikologis. Model sosiologis adalah model yang paling awal dikembangkan dan digunakan untuk menjawab pertanyaan-

## Bab 5

# RASIONALITAS PERILAKU MEMILIH

**B**AB-BAB sebelumnya telah menunjukkan bahwa faktor-faktor sosiologis tidak bisa diabaikan, tetapi tidak cukup meyakinkan untuk menjelaskan perilaku memilih. Faktor-faktor sosiologis yang selama ini dinilai sangat penting, yakni agama, kedaerahan, dan suku bangsa ternyata tidak cukup bisa menjelaskan perubahan politik nasional dari hasil pemilu maupun pilpres. Agama, kedaerahan, dan kelas sosial tidak banyak mengalami perubahan; namun kekuatan partai, kepemimpinan nasional, dan tingkat partisipasi politik mengalami perubahan cepat dari pemilu dan pilpres yang satu ke pemilu dan pilpres yang lain. Proporsi Muslim dan bukan Muslim, santri dan abangan, dalam sepuluh tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan, demikian juga proporsi populasi suku bangsa dan kelas sosial; tetapi politik, kekuatan partai dan wakilnya di DPR, kepemimpinan nasional, dan tingkat partisipasi, mengalami perubahan besar.

Bab ini akan mengeksplorasi seberapa jauh rasionalitas pemilih membantu kita untuk menjelaskan perubahan politik tersebut. Apakah menurunnya tingkat partisipasi politik dalam pemilu dan pilpres sejauh ini merupakan refleksi

# IDENTITAS PARTAI DAN TOKOH POLITIK

**M**ESKIPUN FAKTOR-FAKTOR rasionalitas pemilih penting untuk menjelaskan perilaku memilih, sebagaimana ditunjukkan pada bab 5 sebelumnya, tetapi pengaruhnya menurun setelah dikontrol faktor-faktor psikologis. Karena itu, faktor-faktor psikologis mungkin lebih penting dibandingkan faktor-faktor rasionalitas pemilih.

Aliran atau pendekatan psikologis, yang secara historis berpusat di Universitas Michigan, mulai berpengaruh kuat sejak terbitnya buku *The American Voter* oleh Campbell, dkk. dari hasil penelitian mereka tahun 1950-an tentang pemilih Amerika. Studi mereka bertumpu pada serangkaian survei opini publik level nasional yang dilakukan oleh lembaga yang sampai hari ini masih sangat berpengaruh untuk studi pemilu dan pilpres, yakni *National Election Studies* di universitas tersebut. Karena itu, pendekatan psikologis ini sering juga disebut sebagai *Aliran University of Michigan* tentang perilaku memilih.

Walaupun model ini sebenarnya sudah muncul cukup lama, dan terus dikembangkan, tetapi ia masih relatif baru bagi studi pemilih Indonesia yang demokratis. Ketika Indonesia

## Bab 7

# KESIMPULAN

### DEMOKRAT KRITIS

**PERILAKU MEMILIH** Indonesia berlangsung dalam konteks politik Indonesia yang demokratis. Perilaku ini bermakna karena dilakukan dalam konteks pemilu yang mereka sendiri nilai cukup demokratis, yakni cukup bebas dan adil, tidak seperti pemilu-pemilu yang terjadi sebelum Indonesia mengalami reformasi.

Rakyat Indonesia sendiri punya komitmen yang kuat terhadap demokrasi sebagai sebuah sistem terbaik untuk Indonesia walaupun diakui bahwa sistem tersebut tidak sempurna. Demokrasi dinilai tetap yang terbaik dan paling cocok untuk Indonesia dibandingkan sistem-sistem politik lain.

Komitmen yang kuat terhadap demokrasi ini sebagian besar tergantung pada bagaimana demokrasi dijalankan dalam kehidupan politik Indonesia. Semakin baik kinerja demokrasi ini maka semakin kuat komitmen warga dengan demokrasi. Sebaliknya, bila demokrasi tidak jalan maka komitmen warga

# APENDIKS 1

## DATA, METODE, DAN MODEL

### DATA DAN METODE

STUDI DALAM buku ini bersandar pada data survei pemilih nasional yang dijalankan beberapa hari setelah pemilihan umum atau pemilihan presiden dilaksanakan. Jadi, individu yang punya hak pilih, yang menurut Undang-Undang Pemilu atau Pilpres, telah berumur 17 tahun atau lebih atau telah menikah, adalah populasi dan satuan analisis dalam studi ini. Jumlah sampel pada masing-masing survei berbeda-beda, disesuaikan dengan pengalaman di lapangan dan sumber daya yang tersedia, terutama dana. Pada survei 1999 total sampelnya adalah 2488 responden, sedangkan pada survei-survei berikutnya 2004 dan 2009, total sampel masing-masing adalah 1200. Ukuran sampel 1999 dan 2004 tidak banyak berbeda kalau dilihat dari *margin of error* dengan asumsi *simple random sampling*. Dengan ukuran sampel 2488, *margin of error* +/- 2,4%, sedangkan ukuran sampel 1200 *margin of error* +/- 3%, masing-masing pada tingkat kepercayaan 95%.

Bagaimana sampel-sampel tersebut dipilih dari populasi pemilih nasional Indonesia yang jumlahnya lebih dari 100 juta pemilih dan kemudian sampel itu diyakini mencerminkan karakteristik populasi nasional tersebut dengan toleransi kesalahan tertentu (+/- 2,4% atau +/- 3% pada tingkat kepercayaan 95%)? Untuk itu, sampel atau responden dipilih dengan prinsip *probability sampling* di mana setiap anggota populasi atau warga yang punya hak pilih dalam pemilu atau

# APENDIKS 2

## PENGUKURAN

### *I. DUKUNGAN TERHADAP DAN ARTI DEMOKRASI*

Untuk mengukur tingkat demokrasi di tingkat warga, sejumlah pertanyaan digunakan, dan sebagian besar mereplikasi dari World Value Survey, National Election Project, dan Asian Barometer:

1. Seberapa setuju atau tidak setuju ibu/bapak dengan pendapat yang menyatakan bahwa demokrasi, walaupun tidak sempurna, adalah sistem pemerintahan terbaik, dibandingkan sistem pemerintahan lainnya, untuk negara kita?
  1. Sangat setuju
  2. Setuju
  3. Tidak setuju
  4. Sangat tidak setuju
  8. Tidak tahu
2. Terhadap tiga pernyataan berikut mana yang ibu/bapak setuju?
  1. Dalam keadaan tertentu, pemerintahan otoriter atau bukan demokrasi, bisa diterima
  2. Demokrasi selalu yang terbaik
  3. Tidak penting apa pun bentuk pemerintahan, demokrasi ataupun bukan demokrasi
  8. Tidak tahu

# PUSTAKA RUJUKAN

- Abramowitz, Alan I., dan Kyle L. Saunders. 2006. "Exploring the Basis of Partisanship in the American Electorate: Social Identity vs. Ideology." *Political Research Quarterly*. 59/2.
- Abramson, Paul R. 1983. *Political Attitudes in America*. San Francisco: Freeman.
- , and John H. Aldrich. 1982. "The Decline of Electoral Participation in America." *American Political Science Review*, 76: 502-521.
- Allshop, Dee, dan Herbert F. Weisberg. 1998. "Measuring Change in Party Identification in An Election Campaign." *American Journal of Political Science* 32/4: 996-1017.
- Achen, Christopher H. 1992. "Parental Socialization and Rational Party Identification." *Political Behavior*. 24/2.
- Ambardi, Kuskridho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Anderson, Benedict R. 1996. "Elections and Participation in Three Southeast Asian Countries." *The Politics of Election in*

## TENTANG PENULIS

**S**aiful Mujani sekarang ini adalah peneliti utama di Lembaga Survei Indonesia (LSI), dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Fellow di Mershon Center, Ohio State University, AS. Saiful menyelesaikan S-3 dalam Ilmu Politik di Ohio State University, AS (2003). Sejak mahasiswa doktoral hingga mendirikan Lembaga Survei Indonesia (LSI) di mana ia menjadi peneliti utamanya hingga sekarang, Saiful banyak meneliti tentang perilaku politik massa, terutama dalam pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Hasil penelitiannya ini telah dipublikasikan, di antaranya dalam bentuk buku berjudul *Muslim Demokrat, Partisipasi Politik dan Budaya Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru* (*American Journal of Political Science*, *Comparative Political Studies*, *Journal of Democracy*, dan *Asian Survey*). Dari penelitiannya tersebut, Saiful, bersama Tom Pepinsky (Cornell University), dan Bill Liddle (Ohio State University) mendapat *Franklin L. Burdette/Pi Sigma Alpha Award 2010*, penghargaan karya akademik tertinggi dalam ilmu politik versi Asosiasi Ilmu Politik Amerika Serikat (APSA), yang merupakan asosiasi ilmu politik paling

Rakyat berkuasa untuk memilih presiden dan anggota DPR, dua lembaga yang memiliki peran sangat strategis secara nasional. Oleh karena itu, memahami pola-pola sikap dan perilaku politik rakyat dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden bukan saja penting secara akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi kehidupan kolektif bangsa.

Buku ini menawarkan pendekatan baru dalam literatur tentang perilaku memilih di Indonesia, yakni pendekatan ekonomi-politik dan pendekatan psikologis, guna menggantikan pendekatan sosiologis yang terbukti telah gagal menjelaskan perubahan politik nasional yang berlangsung sangat cepat. Lebih dari itu, ini merupakan buku pertama tentang pemilihan Indonesia yang berbasis riset empiris berskala nasional dari seluruh pemilihan umum dan pemilihan presiden sejak Indonesia kembali menganut demokrasi.

"Buku ini akan bisa menempatkan Indonesia dalam peta studi sistematik-empirik ilmu politik di dunia."

—**Mohtar Mas'ood**

Guru Besar Ekonomi Politik dan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

"Temuan-temuan buku ini harus menjadi perhatian pengamat politik, baik peneliti maupun penguasa."

—**Thomas B. Pepinsky**

Pengajar di Department of Government dan Direktur Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University, AS

**mizan**  
KRONIK ZAMAN BARU

ISBN: 978-979-433-684-7



9 789794 336847 >

WACANA AKADEMIK

NW-003